

PENGEMBANGAN TKSM SEBAGAI PILAR PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Edi Suharto, PhD

Disampaikan pada Seminar Sehari Pengembangan Diklat TKSM, BBPPKS Yogyakarta , 5 Desember 2006. Penulis adalah Ketua Program Pascasarjana Spesialis Pekerjaan Sosial, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung; dan *Social Policy Expert* di Galway Development Services International (GDSI), Irlandia

Kesejahteraan sosial adalah tujuan, bidang, sekaligus arena dimana TKSM (Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat) berkiprah. Karenanya, usaha pertama untuk mengembangkan TKSM sebagai pilar Pembangunan Kesejahteraan Sosial (PKS) adalah memperkokoh pemahaman mengenai konsep kesejahteraan sosial. Pengembangan TKSM harus mengacu pada makna sejati kesejahteraan sosial – termasuk di dalamnya pekerjaan sosial, sesuai dengan *khitah*, prinsip dan landasan konseptualnya. Setelah membahas secara ringkas wacana kesejahteraan sosial, makalah ini mendiskusikan ruang lingkup PKS dan karakteristik TKSM. Naskah ini kemudian membahas tantangan dalam pelatihan TKSM dan diakhiri dengan rekomendasi mengenai *roadmap* (peta-jalan) dan model pengembangan TKSM yang bisa diterapkan di Indonesia.

WACANA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pada umumnya, semua lapisan masyarakat telah mengenal sektor pendidikan atau kesehatan. Masyarakat awam sekalipun tidak mengalami kesulitan memotret kegiatan pendidikan dan kesehatan. Misalnya, jika kita bertanya pada orang awam, apa itu tujuan pendidikan? Biasanya dengan cepat mereka menjawab, “tujuan pendidikan adalah membuat orang pintar.”

Namun demikian, masyarakat kebanyakan di Indonesia belum mengenal dengan baik mengenai arti dan pentingnya kesejahteraan sosial. Masih banyak kelompok masyarakat, baik kaum terdidik maupun awam, yang belum memiliki pemahaman yang “jelas” mengenai apa itu kesejahteraan sosial, apa saja bidang garapan dan siapa saja yang umumnya terlibat dalam kegiatan kesejahteraan sosial. Karenanya, salah satu tantangan besar PKS adalah memberi citra (*brand image*) kepada masyarakat mengenai fokus kesejahteraan sosial.

Banyak orang yang mengartikan kesejahteraan sosial semata-mata sebagai kegiatan pemberian bantuan barang atau uang kepada fakir miskin atau korban bencana alam/sosial. Sebagian lagi mendefinisikan PKS dengan kegiatan rehabilitasi sosial yang dilakukan di panti-panti sosial (panti jompo, panti asuhan, panti karya wanita dst). Belum lama ini, ada pula kalangan yang mencoba mempertegas PKS dengan kegiatan “pemberdayaan” masyarakat, seperti pemberian modal usaha, penyediaan kredit mikro atau pelatihan keterampilan usaha ekonomi produktif. Namun, karena kerangka pikirnya terlalu berorientasi kepada pendekatan ekonomi neoliberalisme, indikator-indikator keberhasilan pemberdayaan menjadi sangat sempit dan melulu bernuansa finansial.

Walhasil, selain program pemberdayaan menjadi sulit dibedakan dengan proyek-proyek penguatan ekonomi Lembaga Swadaya Masyarakat dan perkreditan Grameen Bank, pendekatannya cenderung bersifat residual, meminggirkan peran negara, dan mendewakan keberhasilan individu (*individual achievement*) yang dalam tradisi AS dan Eropa Barat berporos pada doktrin *protestant ethic* dan *laissez-faire*.^{1]} Telaah sejarah menunjukkan bahwa pendekatan seperti ini adalah cara klasik pada masa awal perkembangan kesejahteraan sosial yang di banyak negara sudah ditinggalkan. Selain tidak terbukti mampu meningkatkan standar kehidupan masyarakat, pendekatan ini tidak *compatible* dengan prinsip kesejahteraan sosial yang menjunjung kesetaraan, perlindungan kelompok lemah, dan kewajiban negara (*state obligation*) memenuhi hak-hak publik warga negara.

Masih sedikit yang mengartikulasikan kesejahteraan sosial dalam kaitannya dengan fungsi perlindungan sosial dan pengembangan sosial dalam konteks kebijakan publik di bidang kesejahteraan (*public welfare policy*).^{2]} Yang menarik, untuk tidak menyatakan paradoks, di kalangan yang secara langsung bertugas melaksanakan PKS saja, seperti di Depsos dan Dinsos, berkembang berbagai pengertian kesejahteraan sosial yang berbeda, baik landasan konseptualnya maupun kegiatan aktualnya. Bahkan tidak sedikit yang “memusuhi” (tepatnya mungkin mensalahfahami) konsep “negara kesejahteraan” (*welfare state*) dan “*ujug-ujug*” menyatakan bahwa Indonesia bukan dan tidak mungkin menjadi *welfare state*, melainkan menjadi *welfare society* (masyarakat sejahtera). Padahal, konsep tentang negara kesejahteraan merupakan basis historis dan teoritis PKS. Selain konstitusi kita menyatakan dengan tegas bahwa Indonesia menganut sistem *welfare state*, banyak sekali model *welfare state* yang bisa diterapkan dan tidak terbatas hanya model universal seperti yang dianut negara-negara Eropa Barat dan Skandinavia.^{3]}

^{1]} Charles Zastrow (2000: 231), *Social Problems: Issues and Solutions*, Belmont: Wadsworths

^{2]} Edi Suharto (2006), “Kebijakan Perlindungan Sosial bagi Kelompok Lemah dan Kurang Beruntung”, makalah pada *Seminar Perlindungan Sosial bagi Kelompok Rentan dan Kurang Beruntung: Analisis Kebijakan Perspektif Ketahanan Sosial Masyarakat*, Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat, Badan Pelatihan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Depsos RI, Jakarta 2 Oktober 2006.

^{3]} Amich Alhumami (Kompas, 17 Oktober 2005). Bila membaca ulang UUD 1945, akan tertangkap spirit amat kuat bahwa para *founding father* sejatinya ingin membangun Indonesia menjadi negara kesejahteraan modern (*modern welfare state*). Simak kata-kata emas preambuli konstitusi, ...membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia...untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...Pemikiran para pendiri bangsa tentang negara kesejahteraan lahir karena mereka mengenyam pendidikan Eropa, menjalin pergaulan intelektual dan bersentuhan dengan gagasan para pemikir sosial ekonomi, yang menganut ide *modern welfare state*. Ide negara kesejahteraan modern, menjadi *mainstream* di Belanda, Inggris, Perancis, Jerman, dan negara-negara Skandinavia seperti Denmark, Finlandia, dan Norwegia. Soekarno mengusung propaganda anti-neoimperialisme dan neokolonialisme, membangkitkan semangat perjuangan politik dan membangun ekonomi berdikari. Sjahrir menjadi pemimpin Partai Sosialis Indonesia menawarkan gagasan sosialisme ekonomi. Mohammad Hatta memelopori gerakan ekonomi rakyat melalui koperasi dan pasar sosial. Ketiga tokoh itu, meski akhirnya menempuh jalan politik berbeda, memiliki gagasan sama dalam membangun negara kesejahteraan.

PKS: PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Banyak sekali pengertian mengenai kesejahteraan sosial. Para ahli dan praktisi seringkali memiliki pengertian yang beragam mengenai kesejahteraan sosial. Apa yang pertama kali muncul di dalam benak kita tatkala mendengar istilah kesejahteraan sosial? Apakah kita melihatnya sebagai:⁴⁾

1. *State of human well-being*? Kesejahteraan sosial dipandang sebagai kebaikan sosial yang dalam bahasa Inggris disebut *social well-fare* sebagai lawan dari *social ill-fare* (ketidaksehatan sosial). Artinya, kesejahteraan sosial menunjuk pada kondisi kehidupan sejahtera, kebaikan sosial, keadaan yang baik, kemakmuran, kebahagiaan, yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan kemanusiaan terutama yang mendasar. Misalnya, orang memiliki kesejahteraan sosial jika memiliki tubuh yang sehat, mempunyai penghasilan memadai, memiliki rumah yang layak huni, memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar (seperti membaca dan menulis), atau dapat berinteraksi dengan, dan berpartisipasi dalam, lingkungan sosialnya.

2. *System of social services*? Kesejahteraan sosial diartikan sebagai sebuah sistem kegiatan pelayanan sosial yang dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun non-pemerintah (*civil society*). Di Inggris, Australia dan Selandia Baru, pelayanan sosial umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (*social security*), perawatan kesehatan, penyediaan pendidikan dasar dan khusus, penyediaan perumahan publik dan pelayanan sosial personal (*personal social services*).

Berdasarkan dua dimensi kesejahteraan sosial tersebut, maka PKS dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia (pengertian pertama) melalui sistem pelayanan sosial yang terencana dan berkesinambungan (pengertian kedua). PKS melibatkan berbagai tenaga profesional, seperti pekerja sosial, dokter, sosiolog, psikolog, dan guru; termasuk tenaga sukarela terlatih, diantaranya adalah para aktivis LSM dan TKSM.

Dalam literatur maupun praktek pembangunan di negara-negara lain, istilah PKS jarang sekali digunakan. Istilah yang sering digunakan adalah “kesejahteraan sosial” (*social welfare*), karena istilah itu telah menunjuk dengan jelas sebagai sebuah sektor pembangunan. Bahkan, di beberapa negara istilah “kesejahteraan” (*welfare*) sudah cukup menggambarkan salah satu sektor pembangunan sosial, seperti halnya sektor “pendidikan” atau “kesehatan” yang juga tidak memakai embel-embel kata “sosial”. Nama departemennya juga cukup diberi nama *Ministry of Welfare* atau Departemen Kesejahteraan yang berdiri sejajar dengan Departemen Pendidikan atau Kesehatan di bawah naungan konsep pembangunan sosial. Dengan demikian, kata sosial mencakup makna yang luas yang di dalamnya terdapat sektor pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Jika mengacu pada konsep ini, maka Menko Kesra sejatinya adalah

⁴⁾ Edi Suharto (2006), “Peta dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara” makalah yang disampaikan pada Seminar *Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia*, Institute for Research and Empowerment (IRE), Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta, bertempat di Wisma MM Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 25 Juli 2006

Menko Sosial yang mengkoordinasikan antara lain Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan dan Departemen Kesejahteraan. Dengan nama yang ringkas, diharapkan masyarakat mengenal sektor “kesejahteraan” lebih jelas lagi dan tidak terlalu tumpang tindih dengan sektor “sosial” yang memiliki makna dan cakupan yang lebih luas.

KARAKTERISTIK TKSM

Meski tidak persis sama, di negara-negara lain, seperti AS, Inggris, dan Australia, terdapat beberapa istilah yang mirip dengan TKSM antara lain *welfare worker*, *social and human service assistant*, *community outreach worker*, *community welfare worker*, *voluntary social worker*, dan *community support worker*.^{5]} Simak definisi *welfare worker* (tenaga/pekerja kesejahteraan) berikut ini:

Welfare workers work with individuals, families, groups and communities in order to improve quality of life. They do this by empowering, educating and supporting people and by helping them to change their social environment...Welfare workers deal with problems which may include emotional, social and financial difficulties. Some specialise in helping families, adolescents, people with substance abuse issues, homeless people, people with disabilities, people escaping domestic violence, victims of crime or criminals. Welfare workers work individually or as part of a team. They may work in an office, visit clients in their homes and attend evening community meetings.^{6]}

Peran utama TKSM di Indonesia pada umumnya adalah membantu orang dalam sebuah masyarakat atau komunitas lokal untuk mengidentifikasi kebutuhan sosial, mempertimbangkan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut sesuai dengan sumberdaya yang tersedia di sekitar wilayah setempat. Secara lebih terperinci, tugas-tugas TKSM mencakup:

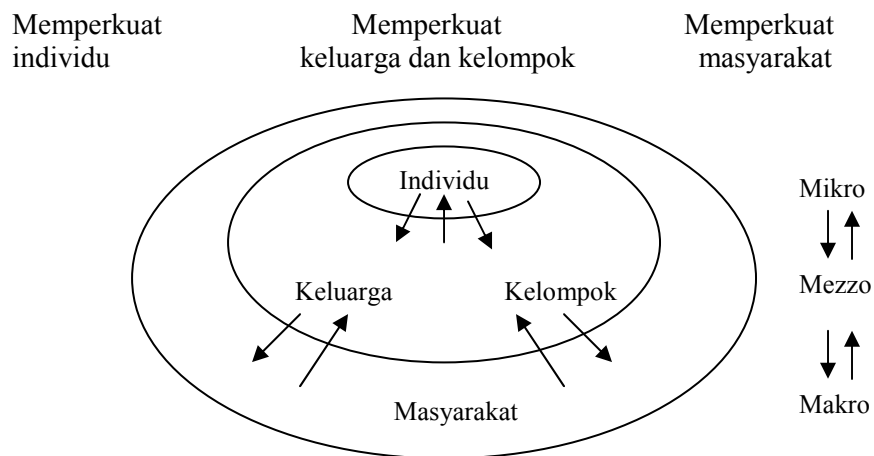
- Pengidentifikasian isu-isu, kebutuhan-kebutuhan dan masalah-masalah masyarakat;
- Membantu meningkatkan kesadaran publik mengenai isu-isu yang relevan dengan masalah dan kebutuhan yang sedang berkembang di masyarakat lokal
- Merencanakan, menghadiri dan mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan dan kegiatan-kegiatan;
- Pengembangan program-program kesejahteraan sosial berbasis masyarakat dan sumberdaya lokal;
- Membangun jaringan untuk mengembangkan program-program yang ada maupun yang direncanakan
- Memetakan jaringan kerjasama antara lembaga-lembaga pemerintah, organisasi-organisasi kemasyarakatan dan para sponsor atau donor;
- Menjadi pendorong, motivator dan koordinator beberapa program kesejahteraan sosial yang sedang beroperasi di masyarakat;

^{5]} Lihat Mark K. Smith (2006), *Community Work*, <http://www.infed.org/community/b-comwrk.htm>; dan <http://www.prospects.ac.uk/cms/ShowPage/Home-page>

^{6]} Lihat *Welfare Worker*, <http://jobguide.thegoodguides.com.au>

- Menjadi fasilitator atau pendamping dalam mempromosikan kemandirian dan ke-swadayaan di masyarakat;
- Menjadi *broker* atau *liaison worker* yang menghubungkan kelompok-kelompok sasaran dengan jaringan dan sistem pelayanan kesejahteraan sosial;
- Memonitor dan mengavaluasi program-program kesejahteraan sosial yang ada;
- Melakukan *fundraising* atau penggalangan dana serta pengelolaan dana-dana masyarakat;
- Mendorong partisipasi warga masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan, pengembangan dan pemantauan program-program kesejahteraan sosial.

Meskipun peran TKSM berporos pada tingkat makro di masyarakat, pada kenyataannya seorang TKSM juga dituntut untuk berperan merespon kebutuhan pada tingkat mikro dan mezzo, yakni individu, keluarga dan kelompok. Dengan demikian TKSM memiliki tiga gugus tugas, yakni memperkuat atau memberdayakan individu, keluarga dan kelompok, serta masyarakat (Gambar 1).



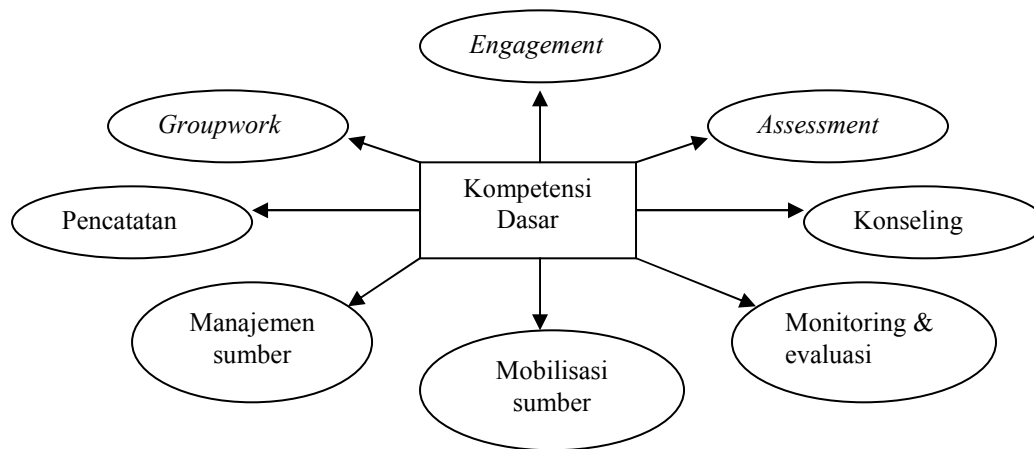
Gambar 1: Tiga Gugus Tugas TKSM
Sumber: Dikembangkan dari Connolly (2004: 35)⁷¹

Oleh karena ketiga gugus tugas itu pada hakekatnya menunjuk pada *setting* dan metoda pekerjaan sosial, maka beberapa kompetensi dasar TKSM juga bisa mengacu kepada kompetensi dasar pekerjaan sosial sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 2 pada halaman berikut.

Di Indonesia, TKSM sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian yang beragam. Guna menghadapi isu-isu dan kebutuhan masyarakat yang juga beragam, maka secara umum kualifikasi TKSM sebaiknya mengacu pada kualifikasi pekerjaan sosial yang bersifat generalis dan praktis. TKSM sekurang-kurangnya harus memiliki:

⁷¹ Connolly, Marrie (2004: 35), "Practice Approaches" dalam Jane Maidment dan Ronnie Egan, *Practice Skills in Social Work and Welfare*, Crow Nest: Allen and Unwin

- Kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan berbagai ragam orang dan kelompok masyarakat;
- Sikap yang tidak menilai;
- Keterampilan dalam berorganisasi dan perencanaan program;
- Kepekaan dan inisiatif untuk membantu orang lain;
- Kepedulian dan tanggungjawab sosial;
- Kemampuan mengatasi konflik, terutama dalam situasi-situasi yang menekan dan sulit;
- Komitmen terhadap hak azasi manusia dan keadilan sosial.



Gambar 2: Kompetensi Dasar TKSM
Sumber: Dimodifikasi dari Connolly (2004: 36)^{8]}

TANTANGAN

Tidak semua TKSM memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan PKS. Beberapa pelatihan telah dilakukan untuk mengembangkan kompetensi mereka. Namun, selain belum dapat menjangkau sebagian besar TKSM yang tersebar di seluruh Tanah Air, beberapa penelitian dan pengamatan menunjukkan bahwa pelatihan terhadap TKSM masih menghadapi beberapa tantangan berikut ini:

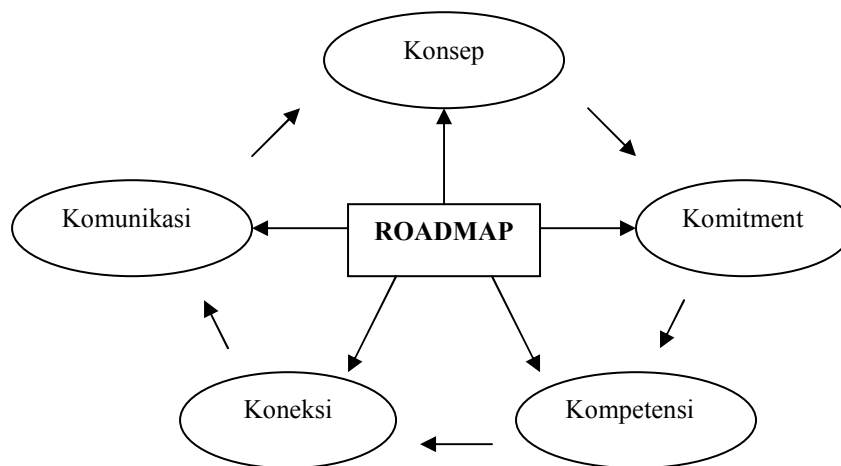
- Kurikulum dan materi pelatihan terlalu teoritis dan umum sehingga tidak mudah diterapkan di tataran praktis dan situasi masyarakat lokal;
- Model pelatihan cenderung bersifat “all size”, kurang berstruktur dan berjenjang sesuai dengan tingkat kecakapan atau kompetensi peserta;
- Para pengajar memiliki pengetahuan yang memadai mengenai materi, namun tidak pernah mempraktekkan materinya dalam dunia nyata. Sehingga, apa yang diajarkan cenderung hanya bersifat normatif dan kurang menyentuh persoalan kontemporer.

^{8]} *ibid*, halaman 36

- Pengajar memiliki pengalaman praktis yang memadai, namun kurang memiliki teknik mengajar yang variatif. Sehingga bahan ajar seakan-akan hanya kumpulan catatan harian yang kering dari gagasan-gagasan segar dan inspiratif.
- Peserta pelatihan memiliki karakteristik pendidikan dan pengalaman yang sangat beragam. Sehingga kurikulum dan materi pelatihan jarang mampu memenuhi secara spesifik kebutuhan peserta.
- Pelatihan yang seharusnya diberikan pada orang yang berbeda, malah disajikan pada orang yang sama. Sebaliknya, pelatihan yang selayaknya disajikan bagi orang yang sama, malah diajarkan pada orang yang berbeda.
- Sulitnya rekrutmen peserta karena melemahnya rentang kendali lembaga pelatihan (antara lain akibat *social cost* desentralisasi), belum kuatnya jaringan kerjasama antara lembaga pelatihan dengan lembaga-lembaga pemerlu, belum adanya pemetaan yang komprehensif mengenai karakteristik TKSM yang sekurang-kurangnya mencakup latar belakang pendidikan, pengalaman, kompetensi yang dimiliki, serta wilayah kerja. Akibatnya, hasil TNA (*Training Needs Assessment*) yang baik sekalipun menjadi kurang bermakna. Karena pelatihan termasuk kurikulum di dalamnya “terpaksa” harus diberikan pada peserta “siapa saja” yang mau datang.

ROADMAP DAN MODEL PENGEMBANGAN TKSM

Berdasarkan karakteristik TKSM dan tantangan pelatihan selama ini, ada beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan untuk mengembangkan TKSM sebagai pilar PKS. Agar mudah diingat, saya akan mengelompokkannya ke dalam Model 5K: Konsep, Komitmen, Kapasitas, Koneksi dan Komunikasi seperti diperlihatkan Gambar 3 di bawah ini.^{9]}



Gambar 3: Model Pengembangan TKSM

^{9]} Lihat Edi Suharto (2005), *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Bandung Alfabeta (edisi revisi); dan Edi Suharto (2006), *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: Refika Aditama (edisi ke-dua)

1. **Konsep.** Pengembangan TKSM harus didasari oleh konsep yang jelas dan tegas mengenai kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial. Meskipun bersifat kesukarelaan, TKSM pada hakekatnya menunjuk pada sosok pekerja sosial yang domain utamanya berkiprah di bidang atau sektor kesejahteraan. Kurikulum pelatihan TKSM, misalnya, selain disusun berdasarkan TNA (Training Needs Assessment) juga perlu dirumuskan berdasarkan paradigma kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial yang berkeIndonesiaan.
2. **Komitmen.** Pengembangan TKSM sebaiknya tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan aspek pengetahuan dan metodologis saja. Melainkan pula aspek sikap dan perilaku agar TKSM memiliki kepekaan, kepedulian, dan inisiatif dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Pengembangan komitmen TKSM ini tidak hanya dilakukan melalui pelatihan saja. Melainkan pula, melalui pemberian pengakuan dan penghargaan atas peran dan karyanya. Pemberian stimulan terhadap proposal kegiatan, pemberian akreditasi atau penjenjangan “karir” TKSM, misalnya, bisa dijadikan pilihan.
3. **Kapasitas** atau Kompetensi. Pengembangan TKSM hendaknya mengacu pada kompetensi dan kualifikasi dasar pekerjaan sosial yang tidak hanya bernuansa *knowledge* saja, melainkan juga *skills* dan *values*. Pelatihan yang terprogram dan berbasis kompetensi perlu dilakukan secara sistematis dan berjenjang. Agar efektif, peningkatan kompetensi TKSM perlu dilakukan tidak hanya berdasarkan metode klasikal saja, seperti ceramah atau kuliah di kelas. Melainkan melibatkan penggunaan teknologi *audio-visual*, teknik *role playing*, dan memperbanyak pembahasan studi kasus serta *best practice* dalam suasana yang dialogis dan andragogis.
4. **Koneksi.** Penguatan kelembagaan perlu dilakukan agar TKSM memiliki payung organisasi yang solid dan berwibawa, baik pada tingkat lokal, regional maupun nasional sebagai wadah pengembangan jaringan diantara mereka.
5. **Komunikasi.** Perlu diselenggarakan forum-forum pertemuan yang berkesinambungan sebagai wahana bagi TKSM untuk saling berkomunikasi dan bertukar pengetahuan serta pengalaman. *Benchmarking* dan *outbond training* di luar wilayah bisa dilakukan guna menambah wawasan dan memperkuat jalinan komunikasi.

KURIKULUM PELATIHAN STRATEGI DASAR PEKERJAAN SOSIAL

Dirancang oleh: Edi Suharto, PhD

Pelatihan ini ditujukan agar peserta pelatihan:

1. Mengetahui dan memiliki pengetahuan mengenai karakteristik dan hubungan antara pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial;
2. Mengetahui dan memiliki pengetahuan mengenai beberapa bidang (*setting*) praktek pekerjaan sosial secara umum;
3. Memiliki kemampuan dalam menerapkan proses pekerjaan sosial dalam memecahkan permasalahan sosial di masyarakat;
4. Memiliki kemampuan dalam menerapkan metoda dan prinsip-prinsip dasar pekerjaan sosial dalam membantu memecahkan permasalahan sosial di masyarakat.
5. Memiliki kepedulian dalam melakukan pekerjaan sosial dan kegiatan-kegiatan kemanusiaan

Materi pelatihan:

1. Memahami kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial
 - a. Pengertian kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial
 - b. Hubungan antara kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial
 - c. Bidang-bidang praktek pekerjaan sosial
 - d. Lembaga-lembaga pelayanan sosial (organisasi sosial, organisasi non-pemerintah, organisasi pelayanan kemanusiaan)
2. Proses pertolongan dalam pekerjaan sosial
 - a. Prinsip-prinsip dasar dan etika pertolongan dalam pekerjaan sosial
 - b. Tahapan pertolongan dalam pekerjaan sosial
 - c. Metode pekerjaan sosial generalis: bekerja dengan individu, kelompok, keluarga dan masyarakat secara terintegrasi
 - d. Komitmen pekerjaan sosial: membangun motivasi diri, empaty dan tanggungjawab sosial dalam membantu sesama
3. Strategi menggalang masalah sosial dan kebutuhan manusia
 - a. Pengertian tentang masalah sosial dan kebutuhan manusia
 - b. Kemiskinan dan masalah sosial
 - c. Teknik-teknik melakukan wawancara: merancang pedoman wawancara, melakukan komunikasi efektif, menggunakan alat perekam, analisis data hasil wawancara
 - d. Teknik-teknik melakukan observasi: merancang pedoman observasi, menerapkan alat-alat bantu observasi (kamera, *transect walks*, kalender musim, pemetaan cepat), analisis data hasil observasi

- e. Teknik-teknik pengumpulan data sekunder: data statistik, laporan resmi, catatan kasus, laporan media massa
4. Strategi merancang program aksi pemecahan masalah sosial dan pemenuhan kebutuhan manusia
 - a. Pengertian tentang program aksi (intervensi) dalam pekerjaan sosial
 - b. Teknik-teknik merumuskan rencana aksi
 - c. Teknik-teknik menggali, memobilisasi dan mengelola sumber
 - d. Teknik-teknik membangun dukungan dan partisipasi
 5. Strategi melakukan aksi pemecahan masalah sosial dan pemenuhan kebutuhan manusia
 - a. Pengertian tentang aksi (intervensi) pekerjaan sosial
 - b. Teknik-teknik membangun relasi pertolongan
 - c. Teknik-teknik melakukan terapi individu, kelompok dan masyarakat
 - d. Teknik-teknik melakukan penyadaran publik (*public awareness*)
 - e. Teknik-teknik melakukan pendampingan
 6. Strategi memonitor dan mengevaluasi proses pemecahan masalah sosial dan pemenuhan kebutuhan manusia
 - a. Pengertian tentang monitoring dan evaluasi dalam pekerjaan sosial
 - b. Teknik-teknik merancang indikator keberhasilan
 - c. Teknik-teknik memonitor dan mengevaluasi
 - d. Teknik-teknik melakukan pencatatan dan pelaporan
 7. Strategi melakukan terminasi dan rujukan dalam pekerjaan sosial
 - a. Pengertian tentang terminasi dan rujukan
 - b. Alasan dan prasyarat terminasi dan rujukan
 - c. Memelihara perubahan-perubahan yang telah dilakukan
 - d. Membuat laporan akhir proyek